

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Muria News

Wilayah: Kabupaten Kudus

Satu Parpol di Kudus Dapat Catatan BPK soal Dana Banpol

<https://www.murianews.com/2022/07/13/301498/satu-parpol-di-kudus-dapat-catatan-bpk-soal-dana-banpol>

MURIANEWS, Kudus – Satu partai politik (parpol) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapat catatan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas penggunaan dana bantuan politik (banpol) pada tahun 2021.

Parpol itu dianggap menggunakan dana banpol tidak sesuai ketetapannya. Di mana 60 persen dari anggaran itu harus digunakan untuk kepentingan pendidikan politik.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus Harso Widodo mengatakan, memang ada satu parpol yang menggunakan banpolnya kurang sesuai ketentuan. Hanya, pihaknya enggan nama parpol tersebut.

"Memang ada satu parpol yang menggunakan banpolnya kurang sesuai ketentuan, jadi dapat sedikit catatan saat pemeriksaan BPK," katanya, Rabu (13/7/2022).

Harso smenyebut, dalam kasus ini, parpol yang bersangkutan memang menggunakan anggaran banpolnya lebih banyak untuk keperluan administrasi. Sementara untuk pendidikan politiknya di bawah 50 persen.

"Ketetapan penggunaan banpol setidaknya memang harus 60 persen untuk dana politik dan maksimal 40 persen untuk administrasi," ujarnya.

Pihak Kesbangpol telah meneruskan catatan ini kepada parpol terkait. Harapannya, ini bisa jadi pembelajaran parpol tersebut atau parpol lainnya.

"Semoga pada penggunaan tahun ini bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah daerah pada tahun 2022 ini mengalokasikan dana banpol untuk sepuluh partai politik pengisi DPRD Kudus sebesar Rp 2,36 miliar.

Proses pencairan banpol pada tahun 2022 ini akan dilakukan sebanyak dua kali. Pada tahap pertama, akan dicairkan sebesar Rp 2.550 per suara yang didapat dalam pemilu. Dana diambilkan dari APBD murni.

Sedangkan pencairan tahap kedua sesuai tambahan yang disepakati adalah sebesar Rp 2.450 per suara yang akan dianggarkan pada Perubahan APBD 2022.